

DAFTAR PUSTAKA

- Al Musbeh, M. (2011). *Managing Elections : Definition and Classification of Election Management Bodies*. *ResearchGate*.
- AlOmedika. (2020). Diambil kembali dari [alomedika.com](https://www.alomedika.com/rapid-test-untuk-covid-19):
<https://www.alomedika.com/rapid-test-untuk-covid-19>
- Azizah, K. N. (2020, Agustus 3). *Satgas COVID-19 Ungkap 5 Kelompok Berisiko Tinggi Kena Corona, Ini Daftarnya*. Diambil kembali dari [detik.com](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5118465/satgas-covid-19-ungkap-5-kelompok-berisiko-tinggi-kena-corona-ini-daftarnya):
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5118465/satgas-covid-19-ungkap-5-kelompok-berisiko-tinggi-kena-corona-ini-daftarnya>
- Bayhaqi, A. (2020, Mei 27). Diambil kembali dari [merdeka.com](https://www.merdeka.com/politik/kpu-diingatkan-tragedi-894-penyelenggara-pemilu-meninggal-agar-tak-paksakan-pilkada.html):
<https://www.merdeka.com/politik/kpu-diingatkan-tragedi-894-penyelenggara-pemilu-meninggal-agar-tak-paksakan-pilkada.html>
- Buril, F., Darnolf, S., & Aseresa, M. (2020). *Menjaga Kesehatan dan Pemilu. International Foundation for Electoral System (IFES)*.
- CNN Indonesia. (2020, Juli 10). Diambil kembali dari [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200709191148-32-522940/batas-usia-petugas-kpps-pilkada-2020-maksimal-50-tahun):
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200709191148-32-522940/batas-usia-petugas-kpps-pilkada-2020-maksimal-50-tahun>
- CNNIndonesia.com. (2019, 4 17). Diambil kembali dari [CNNIndonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417204008-32-387416/bawaslu-sebut-ribuan-kpps-di-pemilu-2019-tidak-netral):
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190417204008-32-387416/bawaslu-sebut-ribuan-kpps-di-pemilu-2019-tidak-netral>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gorantokan, E. O. (2018). *Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014. Jurnal Politico Vol.7 No.2*.
- Hasibuan, M. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- IDN Times. (2020, November 12). Diambil kembali dari [jogja.idntimes.com](https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pertama-kalinya-dua-kecamatan-di-bantul-jadi-zona-merah-covid/3):
<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pertama-kalinya-dua-kecamatan-di-bantul-jadi-zona-merah-covid/3>
- Ismanu, M. N. (2019). *Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi. Jurnal Penelitian Politik Vol.16 No.2, 191-207*.

- Kompas.com. (2020, 1 22). Diambil kembali dari nasional.kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- KPU Kabupaten Bantul. (2019). *Laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019*. Bantul.
- Kurniawan, H. (2019). Pemungutan Suara Ulang : Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab. *Jurnal KPU* .
- Mardiana. (2020). Politisasi Dalam Rekrutmen Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc (Kajian Pola Rekrutmen PPK, PPS, & KPPS di Tanjung Jabung Timur Jambi pada Pilkada 2015). *Politika Vol.11 No.1*.
- Nafisa, A. Y. (2019). Meningkatkan Profesionalisme Petugas KPPS melalui Rekrutmen dan Pelatihan.
- Nugroho, D. J. (2020). Evaluasi Implementasi Aturan Batas Umur Minimal 17 Tahun bagi Badan Ad Hoc Pemilu 2019. *Dinamika Pemilu Serentak, Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 223.
- Nurkinan, D. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif dan Pilpre Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana Vol.3 No.1*.
- PADK Kemenkes. (2020). Diambil kembali dari padk.kemkes.go.id:
<http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html>
- Pandiangan, A. (2018). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media Vol.3(1)*, 17-34.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siagian, T. H. (2020). Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 98-106.
- Simamora, H. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Soelaiman, H. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.

- Spinelli, A. (2020). Managing Election under the Covid-19 Pandemic: The Republic of Korea's Crucial Test. *International IDEA Technical Paper 2*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastrri, E., & Handayani, N. (2017). Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 28 Nomor 1*.
- Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Tirto.id. (2020, November 20). Diambil kembali dari [tirto.id](https://tirto.id/kenali-daftar-orang-risiko-covid-19-selain-lansia-f7bj): <https://tirto.id/kenali-daftar-orang-risiko-covid-19-selain-lansia-f7bj>
- Tribunjogja.com. (2020, Oktober 2020). Diambil kembali dari [Jogja.tribunnews.com](https://jogja.tribunnews.com): <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/19/peta-zonasi-covid-19-di-yogyakarta-sleman-zona-merah-kota-yogya-bantul-gunungkidul-zona-orange>
- Tribunnews.com. (2019, 8 18). Diambil kembali dari palu.tribunnews.com: <https://palu.tribunnews.com/2019/08/18/bukan-kecolongan-kpu-sebut-psu-dilakukan-di-desa-bolobia-karena-pemahaman-kpps-yang-kurang>
- UNAIR. (2019, Mei 24). Diambil kembali dari news.unair.ac.id: <http://news.unair.ac.id/2019/05/23/dosen-fisip-unair-tanggapi-meninggalnya-petugas-kpps/>
- unib.ac.id. (2018, 2 1). Diambil kembali dari repository.unib.ac.id: <http://repository.unib.ac.id/15741/>
- Wall, A., Eliis, A., Ayoub, A., Dundas, C., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggara Pemilu*. Stockholm Swedia: diterjemahkan Oleh Perludem dari International IDEA Electoral Management Design: The International IDEA Handbook.

Wawancara:

Musnif Istiqomah, S.Pd.I. Anggota KPU Kabupaten Bantul (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM), pada tanggal 16 Maret 2021 Pukul 09.30 WIB di Kantor KPU Kabupaten Bantul.

Thamrin Isnawan, SE. Ketua PPK Sewon Pilkada Tahun 2020, pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 09.30 WIB di Pendowo RT.86 Pendowoharjo Sewon Bantul.

Budi Susanto, S.Sn. Ketua PPS Desa Bangunharjo Pilkada Tahun 2020, pada tanggal 19 April 2021 pukul 09.00 di Komplek Kantor Kelurahan Bangunharjo.

Misdi Widoyo. Ketua KPPS TPS 41 Desa Bangunharjo Pilkada Tahun 2020, pada tanggal 21 April 2021 pukul 11.30 WIB di Kantor PT. Yudhistira Jalan Sugeng Jeroni Bugisan Yogyakarta.

Hari Wantoro. Dukuh Gatak Desa Bangunharjo, pada tanggal 21 April 2021 pukul 13.00 WIB di Dusun Mredo Kulon Gatak Bangunharjo Sewon.

Ridwan. Ketua KPPS TPS 14 Randubelang Desa Bangunharjo, pada tanggal 23 April 2021 pukul 13.00 WIB di Kompleks Kantor Kelurahan Bangunharjo.

Febri Lestanto. Dukuh Randubelang Desa Bangunharjo, pada tanggal 26 April 2021 pukul 16.00 WIB di Jalan Imogiri Barat KM. 4.5, Randubelang RT.07 Bangunharjo.

Sutrisno, Anggota Panwas Kecamatan Sewon, pada tanggal 29 April 2021 pukul 09.00 WIB di Jurug Bangunharjo Sewon.

Wahyu Danang Saputro, Panwas Desa Bangunharjo, pada tanggal 30 April 2021 pukul 09.00 WIB di Jalan Imogiri Barat Tanjung, Wojo, Bangunharjo.

Harlina, SH. Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 2021 pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantul.

Peraturan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.